

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiroeddin Sjarif, 2006, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

A.S.S. Tambunan, 2005, *Hukum Militer Indonesia: Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta.

Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

M. Yusri Muzani, 2007, *TNI dan Politik Pasca-Orde Baru*, LIPI Press, Jakarta.

Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Kitab Undang undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
tentang Peraturan Disiplin Militer

Peraturan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Sanksi
Administratif Bagi Prajurit TNI AD

C. JURNAL

Aldy Mirozul dkk., 2024, *“Peran Ankum dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit”*, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 4, hlm. 5–6.

Aris Sarjito, 2025, *“Memerangi Pembelotan: Mengungkap Dampak Kebijakan Pertahanan terhadap Tingkat Tentara Desertir di Zona Tempur”*, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol. 9, No. 1, hlm. 19–31.

Astri Dewi Setyarini dan Irwan Triadi, 2023, *“Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer”*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 5, hlm. 55–62.

Eka Martiana Wulansari, 2017, *“Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasca Reformasi”*, RechtsVinding Online, hlm. 112.

Maxyenty dkk., 2023, *“Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia”*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 11, hlm. 3, 4–5.

Meitha Suryani Rafinda dan Sapto Hermawan, 2023, *“Implementasi Keputusan Kasad”*, Jurnal Discretie, Vol. 4, No. 3, hlm. 289.

Quantum Juris, 2025, "*Tanpa Judul Artikel (Edisi Khusus)*", Jurnal Hukum Modern, Vol. 7, No. 2, April.

Solechan, 2019, "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*", Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, No. 3, hlm. 14–15.

Sri Nur dan Hari Susanto, 2019, "*Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*", Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, No. 1, hlm. 3–4.

Supriyatna, 2014, "*Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI*", Jurnal Hukum Militer, Vol. 2, No. 1, hlm. 14.

Yusniadi A. dkk., 2024, "*Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer*", IURIS STUDIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 5–6.

D. SKRIPSI

Meitha Suryani Rafinda, 2021, *Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Anggota TNI AD yang Melakukan Desersi (Analisis Putusan Nomor: 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2015)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

E. WEBSITE

Danlanud Adisutjipto. 2022. "2 Prajurit TNI Desersi Selama 2 Tahun." *Detik News*. Diakses 28 Maret 2025, dari: <https://news.detik.com/berita/d-6261718>.

Anonim. 2014. "*Pembinaan Hukum Sebagai Fungsi Komando Guna Mendukung Tugas Pokok TNI*." Website Tentara Nasional Indonesia.

Diakses dari: <https://tni.mil.id/view-61921-pembinaan-hukum-sebagai-fungsi-komando-guna-mendukung-tugas-pokok-tni.html>.

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. 2011. "*Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer.*" bisdan-sigalingging.blogspot.com, 23 September, hlm. 43. Diakses 29 April 2025, dari: <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>.

